

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan program pembangunan nasional selama ini tetap bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan investasi yang cukup besar guna mendorong sektor-sektor yang produktif.

Dengan majunya teknik produksi, peranan faktor produksi “modal” menjadi semakin penting pula. Untuk produksi diperlukan bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat yang disebut dengan faktor produksi. Barang produksi ini dihasilkan di rumah tangga produksi, tetapi tidak dijual kepada rumah tangga konsumsi karena tidak dimaksudkan untuk konsumsi, melainkan untuk dipakai dalam proses produksi dijual kepada para produsen di rumah tangga produksi. Pengeluaran rumah tangga produksi untuk membeli barang-barang produksi disebut investasi (T. Gilarso, Drs : 1991 : 45). Investasi sangat penting untuk menggantikan alat produksi yang sudah rusak tetapi juga untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, sehingga dapat menambah produksi dan menampung lebih tenaga kerja.

Dalam hubungan ini, BI sebagai otoritas moneter berperan aktif dalam mendukung terciptanya iklim berusaha yang kondusif terhadap peningkatan investasi yang besar maka pembangunan dapat berkembang yang pesat sehingga pada akhirnya akan menuju terciptanya pemerataan pembangunan. Dalam hal ini sektor swasta itu sendiri para pengusaha membutuhkan modal yang besar, karena dengan modal yang besar maka kegiatan produksi suatu barang akan meningkat.

Dalam penyediaan permodalan swasta dikenal fase yang bergerak melalui tahapan pembiayaan selama siklus kehidupan usahanya. Pada tahap pertama yakni investasi awal, sumber pembiayaan umumnya adalah dari uang pribadi pemilik perusahaan dan berbagai sumber yang diupayakan oleh pemilik perusahaan pada umumnya sudah dikenal baik. Pada tahap kedua perusahaan mulai tampak melampaui kemampuan pembiayaan pemilik. Pada tahap ini pemilik tidak bisa lagi membiayai investasi berikut dengan dana sendiri, sehingga perusahaan harus mencari sumber pembiayaan lain yang lazim terjadi dalam dunia usaha yaitu kredit yang diberikan oleh mitra dagang (Supplier), dikenal dengan trade credit (**Mukhlis Rasyid : 1997 : 17**).

Perkreditan dalam dunia perbankan sangatlah dibutuhkan oleh para pengusaha dalam memajukan usahanya lewat jalan investasi, sehingga kredit mempunyai peran yang positif, kepositifan kredit dapat dilihat dari fungsi-fungsi kredit sebagai berikut:

- a. Kredit menjembatani jarak utama saat uang dibutuhkan dan saat uang itu akan ada.

Adanya kredit memungkinkan produksi pada waktu dibutuhkan, juga kalau saat itu uang atau modal yang diperlukan belum tersedia. Dengan demikian investasi, melalui upaya pergerakan laju inflasi, nilai tukar rupiah yang tetap realistis dan kondisi neraca pembayaran yang mantap. Selain itu, BI juga berupaya mempengaruhi perkembangan suku bunga dan batas-batas yang wajar, dapat mendorong kegiatan investasi yang efisien sekaligus tetap dapat menggalakan kegairahan menabung sebagai sumber dana investasi itu sendiri dan tidak mengganggu pengelolaan moneter pada umumnya.

Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu lama hanya dapat dijamin dengan ekspansi kapasitas produksi yang sebagian besar tergantung pada luasnya pembentukan modal (**Irawan, dan Suparmoko : 1991 : 210**). Di Negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang merata ditempuh secara bertahap. Dalam pelaksanaannya diperoleh modal yang cukup besar dari Dalam Negara atau Luar Negeri.

Modal dalam negeri berasal dari tabungan pemerintah, yang berasal dari selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah yang utama berasal dari pajak yang merupakan penerimaan rutin pemerintah. Penerimaan rutin setelah dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin, bila terdapat sisa, maka sisa inilah yang disebut tabungan pemerintah, modal yang lain berasal dari tabungan masyarakat dimana sebagian pendapatakan masyarakat diterima tidak dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Modal yang ditabung masyarakat dikelola oleh bank dipinjamkan kepada investor dalam melakukan usahanya guna peningkatan produksi, selain dari tabungan

pemerintah dan tabungan masyarakat dana dalam Negeri, juga berasal dari Penanam modal asing. Modal yang ada digunakan untuk peningkatan pembangunan melalui kredit memperlancar arus barang dan menunjang peningkatan produksi dan perdagangan.

b. Kredit menambah produktivitas uang

Dengan adanya uang yang ditabungkan melalui bank sehingga membentuk suatu dana, yang kemudian membiayai sesuatu usaha produksi, uang yang ada diaktifkan dan diproduksi. (T. Gilarso : 1991 : 246).

Dengan demikian peranan kredit dalam peningkatan usaha melalui kegiatan PMDN oleh para pengusaha dari sektor swasta sangat diperlukan. Dengan adanya PMDN maka akan memerlukan modal untuk melakukan investasi yang lebih besar untuk menuju pembangunan nasional. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA KURUN WAKTU TAHUN 1980-2000.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor tingkat suku bunga, jumlah Bank dan Dana masyarakat akan mempengaruhi jumlah kredit perbankan di Indonesia?
2. Seberapa besar perkembangan variabel suku bunga, jumlah bank dan Dana masyarakat terhadap jumlah kredit perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bank dan dana masyarakat terhadap jumlah kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat
2. Untuk mengetahui perkembangan variabel tingkat suku bunga, jumlah bank dan dana masyarakat terhadap jumlah kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Di dalam semua kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai arah dan tujuan yang jelas.. setelah menetapkan tujuan tersebut maka dapat menemukan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia. Hasil penelitian ini menjadi pembandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan kehidupan nyata di masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya mengenai penentuan tingkat suku bunga dan syarat-syarat pendirian bank.

1.5. Hipotesis

Perumusan hipotesa dimaksudkan sebagai petunjuk sementara kearah pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka hipotesa agar lebih mudah dan terarah. Hipotesis yang diajukan adalah :

1. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel tingkat suku bunga, jumlah bank dan dana masyarakat secara bersama-sama terhadap variabel jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat di Indonesia.
2. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel tingkat suku bunga kredit terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat di Indonesia
3. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel dana masyarakat terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat di Indonesia
4. Adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari variabel jumlah bank terhadap jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan yang berasal dari laporan tahunan Bank Indonesia, serta BPS, selain itu juga studi pustaka yang dimaksudkan pemecahan masalah yang sedang diteliti. studi itu dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung sehingga mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang sedang diteliti.

1.6.2. Metode Analisis Data

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kredit perbankan menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (variabel bebas), secara fungsional model tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots)$$

Selanjutnya bentuk fungsi tersebut diformulasikan secara sederhana sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + U_i$$

Dimana: Y = kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat (Milyar Rp)

X1 = suku bunga kredit (%)

X2 = dana masyarakat (Milyar Rp)

X3 = jumlah bank di Indonesia (Unit)

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2,$ = koefisien regresi

U_i = variabel pengganggu

1.6.3. Pengujian Hipotesis

1.6.3.1. Pengujian Hipotesa F-test

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F-hitung dengan F-tabel pada derajat kebebasan tertentu.

Hipotesis yang diajukan:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \rightarrow$ secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0 \rightarrow$ secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

1.6.3.2. Pengujian Hipotesa t-test

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara individu atau tidak.

Hipotesis yang diajukan :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ (Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara individu).

$H_a : \beta_1 \geq 0$ (Variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu).

Dengan menggunakan tabel t-statistik, maka :

Jika t-hitung $< (\alpha, n-k) \rightarrow H_0$ diterima.

Jika t-hitung $> (\alpha, n-k) \rightarrow H_0$ ditolak.

Bila H_0 ditolak, berarti independen atau variabel penjelas yang bersangkutan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, dan sebaliknya jika H_0 diterima artinya variabel independen atau variabel penjelas yang bersangkutan tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap variabel dependen.

1.6.3.3. Pengaruh ketetapan perkiraan (koefisien R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk tingkat ketepatan yang lebih baik, dalam analisis regresi. Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 yang besarnya adalah nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila koefisien determinasi R^2 sama dengan nol, berarti variabel-variabel independen

sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, apabila nilai tersebut semakin mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen.

1.6.3.4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut uji t dan uji f yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid, dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

1. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah variabel pengganggu yang saling berurutan terjadi korelasi serial. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan tes Durbin Watson. Untuk menguji gejala tersebut dilakukan pedoman:

$d < d_l$: ada autokorelasi positif.

$d_l < d < d_u$: tidak ada kesimpulan

$d_l < d < 4-d_u$: tidak ada autokorelasi

$4-d_u < d < 4-d_l$: tidak ada kesimpulan

$4-d_l < d < 4$: autokorelasi

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara beberapa atau semua variabel independen dalam suatu model regresi, maka kaidah yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model empiris yaitu, nilai R^2 yang dihasilkan dari hasil estimasi model empiris sangat tinggi, dan tidak signifikan, variabel bebas berdasarkan uji t-statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan.

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama (konstan) untuk semua variabel bebas. Uji yang digunakan untuk melihat heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan uji Breunc-Pagan-Godfrey.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam Bab, yaitu :

BAB I. Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisa dan sistematika penulisan.

BAB II. Kajian Pustaka

Berisikan uraian mengenai gambaran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk melandasi teori dari penelitian ini

BAB III. Landasan Teori

Mengenai landasan teori dalam bab ini akan dikemukakan teori yang relevan dan definisi-definisi yang berkaitan serta sebagai landasan dasar dari penelitian.

BAB IV. Gambaran Umum Objek Penelitian

Merupakan gambaran mengenai perkembangan jumlah kredit perbankan di Indonesia

BAB V. Analisa Data

Bab ini menjelaskan analisis data yang telah diperoleh dari Bank Indonesia kantor cabang DIY

BAB VI. Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari analisa penelitian dan Implikasi kebijakan yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka diarahkan untuk mendapatkan landasan teori dan literatur yang relevan dengan analisis yang digunakan, dan dasar-dasar teoritis dari sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain penelitian tentang masalah perbankan di Indonesia, adalah penelitian “yang dilakukan oleh Evi Alfiah tahun 2000” pengaruh jumlah bank terhadap persaingan suatu evaluasi restrukturisasi dunia perbankan. Penelitian ini menganalisis apakah jumlah bank dan pakto 88 mempunyai pengaruh terhadap tingkat persaingan yang diukur dari CR (centration ratio). Pangsa pasar yang akan diteliti adalah pangsa pasar terhadap dana pihak ketiga dihimpun oleh bank-bank umum, antara lain bank persero, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional maupun bank asing dan campuran. Secara ringkas model penelitian ini adalah :

$$CRK_t = F (JB, OM, D) \text{ dan } CRD_t = F (JB, OM, D)$$

Secara lebih operasional, bentuk hubungan di atas dengan model berikut ini :

$$CRK_t = \beta_0 + \beta_1 JBT + \beta_2 OMT + \beta_d D_t + \epsilon_t$$

$$CRD_t = \beta_0 + \beta_1 JBT + \beta_2 OMT + \beta_d D_t + \epsilon_t$$

Dimana :

CRK_t = konsentrasi rasio kredit pada periode t

CRD_t = konsentrasi rasio dana pihak ketiga pada periode t.

JBT = Jumlah bank pada periode t.

OMT = Output manufaktur (sektor industri) pada periode t.

D = Variabel boneka, dimana nilai 0 untuk sebelum dan nilai 1 untuk sesudah deregulasi.

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien dari jumlah bank

β_2 = Koefisien dari output manufaktur

β_d = Koefisien kebijakan ekonomi (Pakto 88)

ε_t = Variabel pengganggu pada periode t.

Berdasarkan model yang telah ada, maka pengujian disini menggunakan metode estimasi *generalized least square*. Instruktur yang akan dianalisis disini adalah terhadap ratio kredit dan dana pihak ketiga (CRK dan CRD).

Hasil analisis menunjukkan bahwa ternyata pakto 88 ikut mendorong terciptanya persaingan pada industri perbankan tentara dalam persaingan dalam hal : penyaluran kredit kepada masyarakat maupun persaingan terhadap penarikan dana pihak ketiga dari masyarakat.

Dengan adanya pakto 88 yang menyebabkan jumlah bank maupun kantor bank bertambah, bank pemerintah tidak lagi mendominasi dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat. Kebijakan pakto 88 yang meniadakan pagu kredit menyebabkan JUB di masyarakat semakin banyak, ditambah lagi dengan adanya kebebasan yang diberikan BI bagi bank-bank umum untuk menentukan tingkat suku bunganya sendiri, menyebabkan semakin agresifnya bank-bank tersebut dalam memberikan kredit kepada para nasabahnya dengan tingkat suku bunga

yang murah dan tanpa memperhatikan selektifitas terhadap kredit yang mereka salurkan.

Kondisi seperti ini terus dipertahankan oleh bank-bank pemerintah oleh bank swasta nasional, sehingga ketika terjadi krisis moneter pada perbankan nasional, sebagian besar bank swasta nasional banyak yang bangkrut karena banyaknya kredit macet dan CAR (Capital Adequacy Ratio) yang semakin kecil yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang seimbang dari dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dari masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak bank yang dilikuidasi.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data dan pembuktian hipotesis pada penelitian ini adalah dengan adanya paket kebijakan, pakto 88 menyebabkan konsentrasi pasar semakin menyebar, ini terjadi karena dengan adanya kebijakan tersebut. Jumlah bank maupun jumlah kantor cabang meningkat pesat. Dengan menggunakan variabel kredit dan dana pihak ketiga maka melihat bahwa ternyata jumlah bank tidak menyebabkan konsentrasi dana menurun dan sebaliknya ternyata menurunkan konsentrasi kredit.

Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga pada industri perbankan belum merata, tetapi masih terkonsentrasi pada bank pemerintah yang mempunyai tingkat kepercayaan yang paling tinggi di masyarakat dibandingkan dengan bank swasta nasional, bank pemerintah daerah, maupun bank asing dan campuran.

Untuk penyebaran kredit yang disalurkan oleh industri perbankan menunjukkan pemerataan dan tidak hanya konsentrasi pada bank pemerintah saja

tetapi menuebar ke bank swasta nasional, bank pemerintah, bank asing dan campuran.

Struktur industri dari Bank Umum khususnya bank persero. Jika dilihat konsentrasi rasio kredit (CRK) dan konsentrasi rasio dana pihak ketiga (CRD) dari periode tahun 1980 sampai 1987 ternyata mengkonsentrasi pada bank-bank besar dalam hal ini bank pemerintah (persero) dan mengarah ke bentuk oligopoli.

Mengenai penelitian dan permasalahan yang berkaitan dengan pakto 88, ternyata banyak dipublikasikan, salah satunya adalah oleh Rijanto tentang "Analisis penyebab dan dampak krisis manajemen bank paska pakto 88".

Penelitian ini mengangkat berbagai cerita mengenai pakto 88 dari kronologis perkembangan kehidupan perbankan sejak pakto 88 sampai berbagai permasalahan yang menyertainya.

Dari kronologis perkembangan kehidupan perbankan sejak pakto 27, 1988 telah terlihat bahwa masyarakat umum, dunia usaha maupun dunia perbankan memperoleh kebebasan yang lebih luas dalam mengembangkan kegiatan dan usaha mereka, walaupun sangat terlambat. Namun dengan dikeluarkannya tentang pendirian bank serta pembukaan kantor cabang baru, peningkatan status peningkatan sebagai bank devisa, kelonggaran dalam pendirian bank-bank campuran, sangat tergantung pada dukungan dan bantuan bank sentral, sehingga keadaannya sangat rapuh dalam menghadapi kondisi ekonomi dan moneter yang berlaku. Oleh karenanya atidak mengherankan bahwa sering terjadi gesekan maupun kasus-kasus perbankan yang memerlukan pegangan dan campur tangan bank sentral.

Dengan dikeluarkannya pakto 27, 1988 diharapkan perbankan nasional menjadi lebih kokoh, mandiri dan dewasa sehingga tidak lagi memerlukan dukungan dari bank sentral seperti masa-masa sebelumnya, namun secara bertahap dapat dikurangi dan bahkan pada suatu saat dapat dihilangkan.

Namun apa yang diberikan oleh pakto 27, 1988 tersebut nampaknya telah dimanfaatkan oleh perbankan dengan berlebihan. Sehingga akibatnya dapat kita lihat bahwa ekspansi moneter yang didukung dengan kuat oleh peningkatan kredit perbankan telah menimbulkan akibat-akibat negatif bagi perekonomian nasional.

Dengan menggunakan berbagai perangkat moneter SBI dan SPBU dan dengan kebijaksanaan konsentrasi melalui "Gerakan Sumarfin" pada kuartal 1 tahun 1991 otoritas moneter mengharapkan masyarakat perbankan mampu membaca sinyal yang dilontarkan, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri terhadap langkah-langkah yang akan diambil. Namun kurang pekaan maupun kemungkinan masih rendahnya pemahaman terhadap langkah-langkah yang diambil otoritas tersebut pada akhirnya masih banyak pengelola bank yang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang kurang sejalan dengan arah yang dikehendaki BI.

Sementara itu pertumbuhan bank yang cepat telah membawa problem baru yaitu meningkatnya kebutuhan tenaga pengeiola yang profesional, terampil, berdedikasi dan penuh tanggung jawab yang mampu tentukan perbankan modern. Langkanya tenaga-tenaga tersebut membawa permasalahan baru yaitu perebutan dan semakin banyaknya kasus-kasus pembajakan dan serta meningkatnya biaya tenaga kerja bersangkutan. Dengan perkembangan yang semakin cepat, maka

bank-bank yang kurang didukung tenaga dan kemampuan yang handal, lemahnya perencanaan dan pengendalian serta masih berkembangnya pola pikir kena yang umumnya yang lebih cenderung sosok penampilan bank yang semu telah membawa eksese negatif bagi perkembangan dimasa datang disamping merugikan masyarakat.

Berbagai kasus yang muncul sesudah pakta 27, 1988 memberikan indikasi di samping masih lemahnya sistem pengelolaan maupun pengendalian internal juga maupun kurang efektifnya fungsi pembinaan dan pengawasan internal. Sehubungan dengan hal tersebut akhirnya timbul kembali pertanyaan apakah dengan semakin luas dan semakin bertambah banyaknya lembaga perbankan beserta kegiatan operasinya yang perlu diawasinya dan dibina tidak menjadikan aparat pengawasan dan pembinaan kehilangan kendali dan pelaksanaan pengawasannya menjadi kurang efektif.

Publikasi lainnya yang berkaitan dengan pakto 88 adalah penelitian yang dilakukan oleh Dahlan M. Sulaksana tentang "evaluasi empat tahun pakto".

Dahlan M. Sulaksono melakukan evaluasi terhadap dilaksanakannya paket kebijaksanaan Oktober 27, 1988 dan paket pendukung lainnya. Perekonomian lainnya telah mengalami masa boom dan kemudian meningginya suhu perekonomian (overheated) dalam tahun 1990. Hal ini didorong oleh meningkatnya kegiatan ekonomi di dalam negeri, terutama investasi. Pesatnya pertumbuhan permintaan dalam negeri telah memberikan tekanan pada laju inflasi dan cenderung untuk mendorong pertumbuhan impor barang dan jasa sehingga berakibat meningkatnya defisit neraca tranbsaksi berjalan.

Dampak kebijakan pakto 88 adalah perkembangan yang pesat dibidang perbankan antara perkembangan jumlah bank dan kantor bank sejak tahun 88 perkembangan ini membawa persaingan antar bank dan pelayanan dan produk perbankan serta jaringan Network yang berkembang dengan sangat pesat..

Perkembangan Dana perbankan menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi selama tahun 1989 – 1990, yaitu 45% di tahun 1989 dan 53% ditahun 1990, sedangkan pertumbuhan sampai dengan bulan Oktober 1992 adalah 22%. Posisi tabungan terus mengalami kenaikan, akhir tahun 1989 sebesar Rp 5,2 trilyun. Peningkat ini terus berlanjut sehingga bulan Oktober 1992 menjadi Rp 23 trilyun. Hal yang sama terjadi pula pada deposito berjangka.

Keberhasilan dalam memobilisasi dana masyarakat telah mendorong laju pertumbuhan kredit perbankan dari 24% pada tahun 1988 menjadi 45% di tahun 1989 dan meningkat lagi menjadi 54% di tahun 1990. Sedangkan posisi pemberian kredit pada tahun 1988 adalah Rp 44 trilyun dan di tahun 1990 telah menjadi Rp 98 trilyun.

Peningkatan mobilisasi dana masyarakat dan pemberian kredit telah mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi dalam negeri, terutama investasi, dan pada akhirnya diikuti dengan berbagai kondisi yang menyebabkan memanasnya suhu perekonomian Indonesia (overheated).

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan agar dapat berjalan dengan mantap dan berkesinambungan tanpa kepanasan.

Dalam upaya mencapai sasaran akhir kebijaksanaan moneter, yaitu peningkatan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, stabilitas kerja, serta keseimbangan neraca pembayaran otoritas moneter dan pemantapan kondisi perbankan melalui mekanisme pasar.

Perkembangan selama pelaksanaan deregulasi telah menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan kemandirian perbankan, walaupun disana sini masih terdapat beberapa kekurangan, dapat dicapai melalui mekanisme pasar apabila dilaksanakan kebijaksanaan moneter dan perbankan yang cepat dan tepat.

Kebijaksanaan stabilitas moneter boleh dikatakan sudah mulai memahami sifat-sifat dan perilaku sektor moneter. Perbankan telah menemukan jalur pemantapan usahanya yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa perbankan telah menemukan jalur pemantapan usahanya yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa perbankan yang sehat dan kuat serta didukung oleh kebijakan moneter yang aktif dan konsisten, dapat menjadi andalan berbagai penopang pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang.